

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Per Posisi Tanggal : 4 Januari 2018/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI FITRI DESWATI
2. Jabatan : CALON WALIKOTA
3. NHK : 400902

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 11.118.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3935 m2/- m2 di Kota PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.148.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/- m2 di Kota PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 80.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/48 m2 di Kota PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/60 m2 di Kota PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/90 m2 di Kota PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas - m2/200 m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/150 m2 di Kota PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/- m2 di Kota PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas - m2/12 m2 di Kota PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/234 m2 di Kota PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/60 m2 di Kota PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 380.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU GRAND MAX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. ----

F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
III. HUTANG	Rp.	2.950.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.548.500.000



Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
5. Pengumuman ini disahkan di Jakarta tanggal **7 Maret 2018**.